



*LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 (AUDITED)*

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Telp. (021) 3858001
Fax. (021) 3857917
<http://www.ojk.go.id>

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada ketentuan terakhir Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) OJK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK dan SEDK Nomor 12/SEDK.02/2016 tentang Perubahan Kedua atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 23 Juni 2016.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 10 Juli 2017

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Muliaman D. Hadad

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TAHUN 2016**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap.
b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2017

Wakil Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,



Rahmat Waluyanto

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,

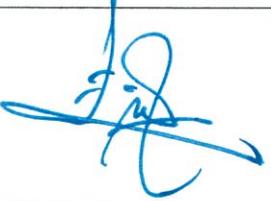
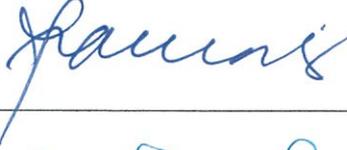
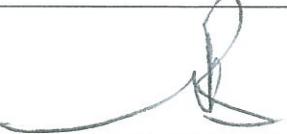


Muliaman D. Hadad

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN 31 DESEMBER 2015**

Jakarta, 10 Juli 2017

Diketahui dan disetujui oleh:

Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	
Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK <i>Ex-Officio</i> Kementerian Keuangan	
Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK <i>Ex-Officio</i> Bank Indonesia	

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	i
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN KEUANGAN	1
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
1. Umum	4
1.1. Organisasi	4
1.2. Dewan Audit dan Komite Etik	6
1.2.1. Dewan Audit	6
1.2.2. Komite Etik	7
1.3. Jumlah Kantor dan Pegawai OJK	7
1.4. Sumber Pembiayaan OJK	8
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	10
2.1. Pihak Berelasi	11
2.2. Imbalan Kerja	11
2.3. Pendapatan	13
2.4. Beban	14
2.5. Kas dan Setara Kas	14
2.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	15
2.7. Surat Berharga	15
2.8. Piutang	16
2.9. Persediaan	17
2.10. Uang Muka Pembelian	18
2.11. Beban Dibayar Dimuka	18
2.12. Aset Tetap dan Aset Takberwujud	18
2.12.1. Aset Tetap	18
2.12.2. Aset Takberwujud	18
2.13. Aset Lainnya	21
2.14. Liabilitas Jangka Pendek	21
2.15. Perpajakan	22
2.16. Aset Neto	22

DAFTAR ISI

3.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan	23
3.1.	Kas dan Setara Kas	23
3.2.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	24
3.2.1.	Dana Pungutan	24
3.2.2.	Dana Imbalan Kerja	25
3.2.3.	Dana Setoran Ke Kas Negara	26
3.2.4.	Dana Pembayaran PPh Badan	26
3.3.	Surat Berharga	26
3.4.	Piutang	27
3.4.1.	Piutang Pungutan	27
3.4.2.	Piutang Lain-lain	28
3.5.	Persediaan	29
3.6.	Uang Muka Pembelian	29
3.7.	Beban Dibayar Dimuka	30
3.8.	Aset Tetap	30
3.9.	Aset Takberwujud	32
3.10.	Aset Lainnya	33
3.10.1.	Aset Pajak Tangguhan	33
3.10.2.	Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang	33
3.11.	Utang Operasional dan Administratif	34
3.12.	Pendapatan Diterima Dimuka	34
3.13.	Utang Setoran ke Kas Negara	35
3.14.	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	36
3.15.	Utang Pajak Badan	40
3.16.	Aset Neto	41
3.17.	Pendapatan	42
3.18.	Beban	43
3.19.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2016	44
LAMPIRAN		
Lampiran I	Struktur Organisasi OJK – <i>Wide</i>	46
Lampiran II	Piutang yang Telah Dihapusbukukan	47
Lampiran III	Daftar Aset Barang Milik Negara	48
Lampiran IV	Daftar Aset Tetap yang Hilang	49
Lampiran V	Daftar Tagihan kepada Wajib Bayar yang Belum Registrasi dan Belum Diserahkan ke PUPN	50
Lampiran VI	Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dapat Digunakan Lagi	51

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*) dan 31 Desember 2015 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.5, 3.1	9.745.118.859	59.850.625.535
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2.6, 3.2	4.570.587.520.254	1.633.701.504.957
Surat Berharga	2.7, 3.3	-	2.660.420.929.948
Piutang	2.8, 3.4	41.734.411.503	25.144.547.797
Persediaan	2.9, 3.5	22.136.480.553	7.735.387.289
Uang Muka Pembelian	2.10, 3.6	1.429.300.000	-
Beban Dibayar Dimuka	2.11, 3.7	722.792.177.281	209.667.635.790
JUMLAH ASET LANCAR		5.368.425.008.450	4.596.520.631.316
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap 2.12, 3.8			
Tanah		137.397.349.139	7.500.000.000
Bangunan		22.042.737.193	
Peralatan dan Mesin		545.114.426.135	433.167.338.331
Aset Tetap Lainnya		40.643.345.210	26.106.430.932
Akumulasi Penyusutan		(209.700.492.614)	(112.633.572.330)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		535.497.365.063	354.140.196.933
Aset Takberwujud 2.12, 3.9			
Software		243.555.495.445	141.087.928.838
Amortisasi Software		(65.360.970.639)	(30.337.667.875)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		178.194.524.806	110.750.260.963
Aset Lainnya 2.13, 3.10			
Aset Pajak Tangguhan		378.704.945.750	238.419.480.250
Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang		180.715.820.995	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		1.273.112.656.614	703.309.938.146
JUMLAH ASET		6.641.537.665.064	5.299.830.569.462
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional dan Administratif	2.14, 3.11	13.681.413.737	64.490.754.225
Pendapatan Diterima Dimuka	2.14, 3.12	21.647.754.921	14.510.361.627
Utang Setoran ke Kas Negara	2.14, 3.13	1.805.018.736	15.171.713.057
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2.14, 3.14	486.226.763.853	154.207.445.000
Utang Pajak Badan	2.15, 3.15	892.470.720.403	237.639.924.462
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.415.831.671.650	486.020.198.371
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2.14, 3.14	1.028.593.020.000	911.731.599.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.028.593.020.000	911.731.599.000
JUMLAH LIABILITAS		2.444.424.691.650	1.397.751.797.371
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2.16, 3.16	4.197.112.973.414	3.902.078.772.091
JUMLAH ASET NETO		4.197.112.973.414	3.902.078.772.091

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN AKTIVITAS

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*) dan
31 Desember 2015 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN	2.3, 3.17		
Pendapatan Pungutan		4.416.320.218.849	3.924.646.956.260
Pendapatan APBN		-	1.730.626.337.451
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Pendapatan		4.416.320.218.849	5.655.273.293.711
BEBAN	2.4, 3.18		
Beban Kegiatan Operasional		487.634.978.517	530.706.001.785
Beban Kegiatan Administratif		3.501.911.870.740	2.948.045.303.050
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		148.318.518.969	111.616.271.492
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		28.416.460.859	44.281.940.014
Jumlah Beban		4.166.281.829.085	3.634.649.516.341
PERUBAHAN ASET NETO		250.038.389.764	2.020.623.777.370
Saldo Awal Aset Neto per 31 Desember 2015		3.902.078.772.091	1.826.082.487.224
Penyesuaian Aset Neto	2.15, 3.16	44.995.811.559	55.372.507.497
SALDO ASET NETO PER 31 DESEMBER 2016		4.197.112.973.414	3.902.078.772.091

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*) dan
31 Desember 2015 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		786.614.328.831	2.336.432.546.340
Arus Masuk		4.398.874.720.492	5.684.036.059.299
Pendapatan Pungutan OJK	3.19	4.397.069.701.756	3.953.409.721.848
Pendapatan APBN		1.805.018.736	1.730.626.337.451
Pendapatan Lainnya		-	-
Arus Keluar	3.19	(3.612.260.391.661)	(3.347.603.512.959)
Beban Kegiatan Operasional		(486.862.833.847)	(522.064.564.661)
Beban Kegiatan Administratif		(3.052.379.543.527)	(2.644.923.571.144)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		(30.629.389.185)	(19.156.891.362)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		(27.216.912.045)	(44.281.940.014)
Penyetoran ke Kas Negara Tahun Sebelumnya		(15.171.713.057)	(117.176.545.778)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		786.614.328.831	2.336.432.546.340
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(379.538.929.163)	(150.459.360.710)
Arus Keluar	3.19	(379.538.929.163)	(150.459.360.710)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(379.538.929.163)	(150.459.360.710)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(379.538.929.163)	(150.459.360.710)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		407.075.399.668	2.185.973.185.630
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		4.353.973.060.440	2.167.999.874.810
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS DITAMBAH KAS YANG DIBATASI PENGUNAANYA 31 DESEMBER 2016		4.761.048.460.108	4.353.973.060.440

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

1.1. Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Sementara berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisiner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisiner Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana pada Lampiran I.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P

tanggal 18 Juli 2012 dan Nomor 72/P tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK, dengan susunan Dewan Komisiner terdiri dari:

- a. Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- b. Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- c. Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- d. Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- e. Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- f. Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2014 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Anny Ratnawati;
- i. Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Bank Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisiner OJK menggantikan Halim Alamsyah.

1.2. Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1. Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 11/KDK.02/2015 tentang Pembentukan Dewan Audit OJK Periode Tahun 2015-2017 terhitung sejak 1 April 2015 sampai dengan

31 Maret 2017 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisiner, yaitu Ilya Avianti;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 1. Janto Hoesada;
 2. Poppy Sofia Koeswayo;
 3. Anis Baridwan; dan
 4. Zainal Arifin Mochtar.

1.2.2. Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 10/KDK.02/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Komisiner Nomor 15/KDK.02/2013 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Maret 2014. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- b. Anggota :
 1. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
 2. Anggota Eksternal:
 - (a) Mas Achmad Daniri;
 - (b) Emmy Yuhassarie Ruru.

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK.

1.3. Jumlah Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.286 orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Pegawai Tetap	2.376	1.882
2.	Bank Indonesia (penugasan pada OJK)	1.045	1.081
3.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pegawai Honorer	244	449
4.	Calon Pegawai	596	220
5.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	25	19
Jumlah		4.286	3.651

Pembayaran gaji Pegawai Penugasan dari Bank Indonesia di OJK Tahun 2016 dilakukan oleh Bank Indonesia dan tunjangan kesetaraannya dibayar oleh OJK. Pada tanggal 1 Januari 2017 jumlah pegawai penugasan dari Bank Indonesia di OJK yang kembali ke Bank Indonesia sejumlah 347 orang, sehingga jumlah pegawai yang menentukan pilihan di OJK sejumlah 698 orang.

1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 40/KDK.02/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2016 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2016 sebesar Rp3.934.100.000.000,00. Dalam realisasinya, penerimaan pungutan OJK Tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp4.627.312.947,00 yang selanjutnya berdasarkan Catatan Dinas Deputi Komisiner Manajemen Strategis IIB Nomor CD-1/MS.4/2017 digunakan sebagai tambahan pembayaran PPh Badan OJK tahun 2015. Selain itu, terdapat penerimaan jasa giro tahun 2015 sebesar Rp172.047.274,00 yang digunakan untuk pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 165/KRDK/2016 tanggal 21 Desember 2016. Dengan demikian, realisasi dana

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pungutan yang digunakan untuk membiayai operasional OJK Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.938.899.360.221,00.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	APBN		Pungutan		Jumlah
	Rp	%	Rp	%	Rp
2013	1.645.293.987.000	100	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46	2.009.326.213.485	54	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100	3.938.899.360.221

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Nomor 10/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, dan terakhir diubah dengan SEDK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana terakhir diubah menjadi SEDK Nomor 12/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- c. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud tanggal 9 Juli 2015;
- d. SEDK Nomor 17/SEDK.02/2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 November 2015;
- e. SEDK Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2016.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1. Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
- b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, seperti Dana Pensiun OJK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK;
- c. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK;
- d. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2. Imbalan Kerja

Kebijakan terkait imbalan kerja (*employee benefits*) telah diputuskan melalui:

- a. Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 2015;
- b. Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai Tahun 2015.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

1. Dana Pensiun OJK (DAPEN OJK)

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK;

- b. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK.

2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK)

Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK). Yayasan tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

3. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

1. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
2. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur sebesar nilai nominal;
3. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
4. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur dengan cara sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Menggunakan jasa dan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu; dan
- b. Menentukan jumlah keuntungan/kerugian aktuarial dan jumlah beban yang diakui dalam Laporan Aktivitas.

Dana yang dialokasikan untuk Imbalan Kerja Jangka Panjang merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan disajikan pada kelompok Aset Lancar atau Aset Tidak Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.3. Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari APBN, Pungutan, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, sedangkan Pendapatan Lainnya diakui pada saat OJK menerima hibah sesuai dengan dokumen serah terima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pendapatan Pungutan kepada Sektor Jasa Keuangan adalah pendapatan yang diperoleh dari:
 1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
 2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
 3. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan (sebagai contoh antara lain penempatan dana pungutan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku); dan
 4. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Pendapatan APBN yaitu pendapatan yang diperoleh dari:
 1. Pendapatan APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi;
 2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.
- c. Pendapatan Lainnya
Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

2.4. Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;
- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul dari kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi;
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3).

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau Liabilitas timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya dan khusus beban kegiatan pengadaan aset juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai wajar Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

2.5. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang antara lain terdiri dari:

- a. Uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK;
- b. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan
- c. Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK). Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar atau Aset Tidak Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.7. Surat Berharga

Surat Berharga adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK sebagai upaya dalam mengelola uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan melalui deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.

- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Keputusan Dewan Komisioner Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat Berharga adalah sebagai berikut.

- a. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka diperolehnya atau didapatkannya penempatan deposito dan/atau surat berharga. Untuk amortisasi Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo dilakukan menggunakan metode garis lurus;
- b. Surat Berharga yang dimiliki tidak sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai wajar.

2.8. Piutang

Piutang adalah hak yang timbul atas terutangnya uang oleh pihak lain dalam rangka kegiatan OJK. Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih dan nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK dari Piutang. Piutang terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang Lain-lain.

Berdasarkan SEDK Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan, piutang OJK diakui pada saat terdapat:

- a. Hak untuk menagih pungutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Hak untuk menagih kelebihan pembayaran transaksi;
- c. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan/atau
- d. Nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal dan/atau jangka waktu pelunasan.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah berdasarkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bayar yang belum terdaftar akan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*).

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK/2016 Pasal 12 tentang Manajemen Piutang dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan dalam RDK. Dalam hal RDK menyetujui usulan penghapusbukuan piutang, nilai piutang dikurangi sebesar nilai piutang yang dihapusbukuan dan dicatat pada rekening administratif di Laporan Komitmen sebagaimana pada Lampiran II. Pembayaran atas Piutang Pungutan OJK yang telah dihapusbukuan dapat mengubah saldo kas dan pendapatan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran.

2.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir.

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan

saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan.

2.10. Uang Muka Pembelian

Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka pembelian diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang muka pembelian barang berkurang pada saat barang diterima OJK.

2.11. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah aset berupa jasa/fasilitas yang telah dibayar oleh OJK tetapi belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran hak memanfaatkan jasa/fasilitas dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.12. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

2.12.1. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Tetap diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2.12.2. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Takberwujud diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya Legal Audit, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Aset Tetap (*revenue expenditure*) dan kebijakan akuntansi untuk biaya renovasi, peremajaan, penambahan kapasitas yang menambah umur ekonomis dan atau nilai guna aset, yang berkaitan dengan Aset Tetap (*capital expenditures*) adalah sebagai berikut.

- 1) Biaya Selanjutnya Aset Tetap
 - a) Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
 - (1) dalam hal dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku;
 - (2) dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah;
 - b) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap;
 - c) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya;
 - d) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), diakui sebagai beban tahun

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berjalan.

- 2) Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud
 - a) Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi;
 - b) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a), diakui sebagai beban berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Berdasarkan Keputusan Deputy Komisioner MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK menjelaskan bahwa Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud	
1)	Kelompok Aset Tetap
a.	Bukan Bangunan dengan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun
b.	Bangunan dengan masa manfaat 20 Tahun
c.	Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak terdapat dalam Lampiran Keputusan Deputy Komisioner, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan Kelompok masa manfaat aset tersebut
2)	Kelompok Aset Takberwujud dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, atau 20 tahun.

2.13. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang. Aset Pajak Tangguhan yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
- b. Akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

Aset Lainnya diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dimanfaatkan. Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai tercatat.

Dalam implementasinya, aset pajak tangguhan dihitung menggunakan pendekatan neraca (*Asset Liability Method*). Pemulihan aset pajak tangguhan akan terlihat apabila terjadi penurunan saldo akun kewajiban yang terkait dengan koreksi fiskal temporer di neraca.

2.14. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

- a. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan misalnya Utang Biaya dan Utang Pajak;
- b. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK pada periode akuntansi berjalan;
- c. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau Kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja, yaitu Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja yang direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a) sampai d) di atas.

2.15. Perpajakan

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 1. Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan;
 2. Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
- b. Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK. Berdasarkan surat dimaksud ditegaskan bahwa:
 1. OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut maka OJK adalah subjek Pajak Penghasilan.
 2. Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

2.16. Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan aset neto tidak terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp9.745.118.859,00 dan Rp59.850.625.535,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kas	-	-
Bank	9.745.118.859	59.850.625.535
Jumlah	9.745.118.859	59.850.625.535

Saldo Kas Tahun 2016 pada Rekening Mandiri (rekening induk) sebesar Rp9.745.118.859,00 telah digunakan untuk menyelesaikan transaksi kegiatan OJK Tahun 2016 yang dibayarkan melalui pos susulan sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.

Saldo Kas sebesar Rp9.745.118.859,00 merupakan bagian dari rekening pengeluaran OJK per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp24.982.308.445,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Rekening	Saldo per 31 Desember 2016
1	Rekening Induk	17.496.041.313
2	Rekening Pelaksana Pencairan Dana (PPD)	391.656.163
3	Rekening Imbalan Kerja Jangka Panjang	7.080.000.000
4	Rekening Antara Gaji	14.610.969
	Jumlah	24.982.308.445

Rincian tersebut disajikan dengan pengelompokan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2016
1	Kas dan Setara Kas	9.745.118.859
2	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	15.237.189.586
	a. Dana Pungutan	1.226.958.996
	b. Imbalan Pasca Kerja	7.080.000.000
	c. Pembayaran Pajak	5.125.211.854
	d. Utang Setoran Ke Kas Negara	1.805.018.736
	Jumlah	24.982.308.445

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.2. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.570.587.520.254,00 dan Rp1.633.701.504.957,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan		31 Desember 2016	31 Desember 2015
Dana Pungutan		4.402.885.242.389	1.292.988.791.900
a.	Pungutan tahun berjalan	4.381.237.487.468	1.278.478.430.273
b.	Pendapatan Diterima Dimuka	21.647.754.921	14.510.361.627
Dana Imbalan Kerja		341.315.820.995	325.541.000.000
Dana Setoran Kas Negara		1.805.018.737	15.171.713.057
Dana Pembayaran PPh Badan		5.297.259.128	-
Jumlah		4.751.303.341.249	1.633.701.504.957
Reklas Dana Imbalan Kerja ke Aset Lainnya (Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang)		(180.715.820.995)	-
Jumlah		4.570.587.520.254	1.633.701.504.957

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pungutan tahun 2016 yang dapat digunakan pada tahun 2017 sebesar Rp4.381.237.487.468,00.

3.2.1. Dana Pungutan

Dana pungutan yang diperoleh pada tahun 2016 dan dapat ditempatkan adalah sebesar Rp4.402.885.242.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Saldo
1	Giro Bank Indonesia	288.163.522.587
2	Giro Bank Rakyat Indonesia (a+b+c)	490.847.145.950
a.	Dana Pungutan	499.714.014.219
b.	Reklas atas Imbal Hasil Pengelolaan dari Dana Imbalan Kerja yang direklas ke Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang	(8.694.820.995)
c.	Reklas atas Dana Pungutan ke Dana Pembayaran PPh Badan	(172.047.274)
3	Giro Bank Mandiri atas Jasa Giro Dana Operasional, Wanprestasi, dan Retur	1.226.958.997
4	Deposito Bank Rakyat Indonesia	1.063.639.212.282
5	Deposito Bank Mandiri	738.098.212.282
6	Deposito Bank Negara Indonesia	1.063.639.212.282
7	Deposito Bank Tabungan Negara	757.270.978.009
Jumlah Dana Pungutan		4.402.885.242.389

Penempatan deposito pada Bank BUMN tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan bersifat perpanjangan secara otomatis.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp21.647.754.921,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Registrasi	53	16.802.078
2	Biaya Tahunan	20.843.437.943	14.429.877.349
3	Sanksi	667.361.523	29.292.200
4	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya	126.946.350	34.390.000
5	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk	10.009.052	-
Jumlah		21.647.754.921	14.510.361.627

3.2.2. Dana Imbalan Kerja

Dana Imbalan Kerja Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp160.600.000.000,00 dan Rp325.541.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendanaan Tahun 2015	325.541.000.000	325.541.000.000
Imbal Hasil Pengelolaan dari Dana Imbalan Kerja	8.694.820.995	-
Pendanaan Tahun 2016	7.080.000.000	-
Jumlah Dana Imbalan Kerja	341.315.820.995	325.541.000.000
Reklas ke Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang	(180.715.820.995)	-
Jumlah Dana Imbalan Kerja Lancar	160.600.000.000	325.541.000.000

Hasil perhitungan Aktuaris PT Dayamandiri Dharmakonsilindo Nomor 0070/ST-RS-PSAK24-OJK/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 besarnya beban imbalan kerja OJK per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp641.604.226.000,00 terdiri dari imbalan kerja untuk kesehatan sebesar Rp64.897.325.000,00, Dana Pensiun sebesar Rp47.578.550.000,00, dan untuk karyawan aktif sebesar Rp529.128.351.000,00.

Keputusan Rapat Dewan Komisiner (KRDK) Nomor 165/KRDK/2016 tanggal 21 Desember 2016 menyetujui bahwa sisa kelebihan anggaran per 21 Desember 2016 sebesar Rp7.080.000.000,00 dialokasikan untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja jangka panjang tahun 2016.

Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 104/KRDK/2016 tanggal 31 Agustus 2016 menetapkan bahwa dana cadangan program imbalan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kerja yang telah dibentuk sebesar Rp325.541.000.000,00 digunakan untuk pembayaran imbalan kerja pegawai tahun 2017 sebesar Rp160.600.000.000,00. Pendanaan imbalan kerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah meningkat menjadi sebesar Rp341.315.820.995,00. Dari nilai tersebut yang disajikan dalam aset lancar sebesar Rp160.600.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp180.715.820.995,00 disajikan sebagai aset tidak lancar dengan subakun Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang dalam kelompok akun Aset Lainnya.

3.2.3. Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran Ke Kas Negara sebesar Rp1.805.018.737,00 berasal dari penerimaan pengembalian belanja dan denda wanprestasi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN.

3.2.4. Dana Pembayaran PPh Badan

Utang PPh Badan sebesar Rp892.921.975.153,00 sampai pada tanggal 31 Desember 2016 telah dibayar secara angsuran dengan menggunakan sisa anggaran tahun 2016 sebesar Rp5.125.211.853,00 yang disetor pada tanggal 16 Januari 2017 dan sebesar Rp172.047.275,00 tanggal 1 Maret 2017.

3.3. Surat Berharga

Saldo Surat Berharga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.660.420.929.948,00.

Surat Berharga per 31 Desember 2015 dengan jumlah sebesar Rp2.660.420.929.948,00 seluruhnya telah jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut.

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Seri	Nilai Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo
1	SPN 12160204	729.419.832.000	04/02/2016
2	SPNNT20160401	1.309.000.361.968	01/04/2016
3	SPNNT20160902	622.000.735.980	02/09/2016
Jumlah		2.660.420.929.948	

Atas Surat Berharga yang telah jatuh tempo tersebut telah ditempatkan pada deposito yang dicatat dalam akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.4. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp41.734.411.503,00 dan Rp25.144.547.797,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Piutang Pungutan	41.584.972.104	25.007.395.819
Piutang Lain-lain	149.439.399	137.151.978
Jumlah	41.734.411.503	25.144.547.797

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

3.4.1. Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang Pungutan	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2016	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2015
I	Biaya Tahunan	22.052.573.622	(725.578.745)	21.326.994.877	13.391.903.172
1	Perbankan	2.755.720.916	(92.189.889)	2.663.531.027	2.732.004.995
2	Pasar Modal	10.271.155.740	(633.388.856)	9.637.766.884	6.505.230.205
3	Industri Keuangan Non Bank	9.025.696.966	-	9.025.696.966	4.154.667.972
II	Sanksi	9.428.841.754	(2.748.580.910)	6.680.260.844	6.185.721.300
1	Perbankan	1.374.159.900	-	1.374.159.900	1.660.446.500
2	Pasar Modal	5.946.301.310	(2.748.580.910)	3.197.720.400	3.346.234.800
3	Industri Keuangan Non Bank	2.108.380.544	-	2.108.380.544	1.179.040.000
III	Piutang Penggunaan Pungutan	13.577.716.383	-	13.577.716.383	5.429.771.347
1	Pengelolaan Dana Pungutan	10.979.567.726	-	10.979.567.726	-
2	Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	1.107.731.293	-	1.107.731.293	-
3	Denda Wanprestasi Penataan Gedung	1.445.831.924	-	1.445.831.924	-
4	Pengembalian Tiket Perjalanan Dinas	1.531.240	-	1.531.240	8.318.670
5	Pengembalian Pengadaan Barang Pencetakan	43.054.200	-	43.054.200	-
6	Pengembalian Biaya Beban Asuransi dari Asuransi Equity	-	-	-	5.007.237.530
7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pembebanan PPh dan Denda Keterlambatan dari PT Eracom Infonusa	-	-	-	414.215.147
	Jumlah	45.059.131.759	(3.474.159.655)	41.584.972.104	25.007.395.819

Pada tahun 2016, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp3.474.159.655,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner No.39/KRDK/2017 tanggal 02 Maret 2017. Hal ini sesuai dengan SEDK Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang OJK yang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

menyatakan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke PUPN dapat dihapusbukukan dengan usulan dari satker yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan dalam RDK bersamaan dengan pengajuan Laporan Keuangan.

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<u>Belum jatuh tempo</u>	16.846.687.914	14.502.026.693
<u>Telah jatuh tempo</u>		
1 - 30 Hari	9.545.696.265	142.141.944
31 Hari - 3 Bulan	3.949.314.860	2.680.543.946
3 Bulan - 6 Bulan	1.821.808.992	2.564.136.371
6 Bulan - 1 Tahun	4.609.075.833	2.858.874.547
Lebih dari 1 Tahun	4.812.388.240	2.259.672.318
Jumlah	41.584.972.104	25.007.395.819

Berdasarkan tabel di atas, per tanggal 31 Desember 2016, OJK memiliki piutang pungutan yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet namun penagihannya belum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp4.812.388.240,00.

OJK memiliki hak tagih kepada wajib bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Tagihan kepada wajib bayar yang belum registrasi dan belum diserahkan ke PUPN sebanyak 1.690 wajib bayar dengan potensi tagihan sebesar Rp9.230.513.145,00 (Lampiran V).

Nilai piutang yang belum registrasi dan telah diserahkan ke PUPN sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp7.620.875.654,00.

3.4.2. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp149.439.399,00 dan Rp137.151.978,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pegawai.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp22.136.480.553,00 dan Rp7.735.387.289,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi/Alat Tulis Kantor	22.115.366.853	7.671.181.329
Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku/Perlengkapan Kantor	21.113.700	64.205.960
Jumlah	22.136.480.553	7.735.387.289

Mutasi Persediaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2015	7.735.387.289
Mutasi Tambah:	
Pembelian Persediaan	30.629.389.185
Mutasi Kurang:	
Beban Persediaan	16.228.295.921
Saldo per 31 Desember 2016	22.136.480.553

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kantor Pusat	19.784.697.442	6.103.427.059
Kantor Regional	1.027.282.579	738.978.263
Kantor OJK	1.324.500.532	892.981.967
Jumlah	22.136.480.553	7.735.387.289

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp22.136.480.553,00 terdiri dari:

- Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.625.402.930,00. Berdasarkan saldo tersebut, terdapat nilai persediaan sebesar Rp962.389.445,00 yang merupakan barang keperluan perkantoran sehari-hari yang tidak bisa digunakan lagi (Lampiran VI);
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp20.511.077.623,00.

3.6. Uang Muka Pembelian

Saldo Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.429.300.000,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan uang muka atas pekerjaan paket pengadaan penataan dan penyediaan fasilitas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penunjang Gedung Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Penataan dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor SPJ-01/MS.43/PPK/PPKR8/2016 batas waktu pertanggungjawaban tanggal 6 Mei 2017.

3.7. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp722.792.177.281,00 dan Rp209.667.635.790,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Sewa Kantor OJK	705.625.244.554	185.531.921.337
Sewa Rumah Jabatan	16.904.106.793	22.700.726.274
Premi Asuransi	262.825.934	1.434.988.179
Jumlah	722.792.177.281	209.667.635.790

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2016 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Sewa Rumah Jabatan	Sewa Kantor	Premi Asuransi	Jumlah
Kantor Pusat	9.167.959.306	584.815.430.324 *)	-	593.983.389.630
Kantor Regional	2.542.870.371	83.840.769.969	66.399.920	86.450.040.260
Kantor OJK	5.193.277.116	36.969.044.261	196.426.014	42.358.747.391
Jumlah	16.904.106.793	705.625.244.554	262.825.934	722.792.177.281

*) Pengadaan Kantor Pusat tersebut dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa dengan opsi membeli yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2015	209.667.635.790
Mutasi Tambah:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2016	662.316.682.175
Mutasi Kurang:	
Jumlah yang telah dimanfaatkan/beban	125.936.140.684
Reklasifikasi ke Aset Tetap (Pembelian Tanah dan Bangunan)	23.256.000.000
Saldo per 31 Desember 2016	722.792.177.281

3.8. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp535.497.365.063,00 dan Rp354.140.196.933,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan Aset Tetap	31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2016
Tanah :					
Tanah	7.500.000.000	129.897.349.139	-	-	137.397.349.139
Gedung Kantor		16.380.347.530		5.662.389.663	22.042.737.193
Total Tanah	7.500.000.000	146.277.696.669		5.662.389.663	159.440.086.332
Peralatan dan Mesin:					
Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.006.416.000	-	-	-	1.006.416.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	150.917.860.639	-	-	-	150.917.860.639
Mesin Kantor	179.870.023	15.559.650	-	-	195.429.673
Mesin Pembangkit Tenaga	5.617.863.552	2.509.065.950	-	-	8.126.929.502
Mesin Pendingin	6.284.522.501	3.570.072.135	-	-	9.854.594.636
Mesin Pengolah Data	151.018.281.395	74.660.982.395	-	-	225.679.263.790
Peralatan Keamanan	514.580.000	599.620.340	-	-	1.114.200.340
Peralatan Telekomunikasi	26.377.157.856	3.763.295.770	-	-	30.140.453.626
Peralatan Lainnya	155.677.235	18.300.000	-	-	173.977.235
Peralatan Rumah Tangga	46.039.934.623	15.617.840.695	-	-	61.657.775.318
Peralatan Studio	23.374.832.788	2.886.610.212	-	-	26.261.443.000
Peralatan/ Perlengkapan Kantor	21.680.341.719	8.305.740.657	-	-	29.986.082.376
Total Peralatan dan Mesin	433.167.338.331	111.947.087.804			545.114.426.135
Aset Tetap Lainnya:					
Aset Tetap Lainnya	26.106.430.932	21.630.046.065	1.430.742.124	(5.662.389.663)	40.643.345.210
Total Aset Tetap Lainnya	26.106.430.932	21.630.046.065	1.430.742.124	(5.662.389.663)	40.643.345.210
Jumlah	466.773.769.263	279.854.830.538	1.430.742.124		745.197.857.677

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2016
Tanah:					
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung Kantor	-	-	-	-	-
Total Tanah					
Penyusutan Peralatan dan Mesin :					
Kendaraan Bermotor Roda Dua	503.208.000	251.604.000	-	-	754.812.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	37.681.507.770	18.864.732.580	-	-	56.546.240.350
Mesin Kantor	48.885.241	47.116.137	-	-	96.001.378
Mesin Pembangkit Tenaga	888.239.974	1.765.888.720	-	-	2.654.128.694
Mesin Pendingin	499.377.074	882.805.240	-	-	1.382.182.314
Mesin Pengolah Data	39.177.035.959	39.009.200.648	-	-	78.186.236.607
Peralatan Keamanan	2.452.083	114.787.750	-	-	117.239.833
Peralatan Telekomunikasi	6.815.070.720	6.619.486.775	-	-	13.434.557.495
Peralatan Lainnya	16.337.830	39.908.892	-	-	56.246.722
Peralatan Rumah Tangga	11.479.346.229	10.206.844.927	-	-	21.686.191.156
Peralatan Studio	8.610.460.584	5.930.483.871	-	-	14.540.944.455
Peralatan/ Perlengkapan Kantor	6.250.911.745	5.428.745.504	-	-	11.679.657.249
Total Penyusutan	111.972.833.209	89.161.605.044			201.134.438.253
Penyusutan Aset Tetap Lainnya:					
Aset Tetap Lainnya	660.739.121	7.905.315.240	-	-	8.566.054.361
Total Penyusutan	660.739.121	7.905.315.240			8.566.054.361
Jumlah	112.633.572.330	97.066.920.284			209.700.492.614
Jumlah Tercatat Aset Tetap	354.140.196.933	182.787.910.254			535.497.365.063

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp535.497.365.063,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp175.159.973.817,00 (Lampiran III);
- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp360.279.391.246,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Atas Aset Tetap tersebut diketahui bahwa per 31 Desember 2016 terdapat Aset Tetap yang hilang senilai Rp63.918.090,84 sebagaimana pada Lampiran IV.

Status Hak Kepemilikan Aset Tetap OJK per 31 Desember 2016 atas tanah Papua dan Bandung masih dalam proses penegasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

3.9. Aset Takberwujud

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp178.194.524.806,00 dan Rp110.750.260.963,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Takberwujud	31 Desember 2015	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2016
Software	141.087.928.838	102.467.566.607	-	243.555.495.445
Jumlah	141.087.928.838	102.467.566.607	-	243.555.495.445

Amortisasi Aset Takberwujud	31 Desember 2015	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2016
Software	30.337.667.875	35.023.302.764	-	65.360.970.639
Jumlah	30.337.667.875	35.023.302.764	-	65.360.970.639
Jumlah Aset Takberwujud	110.750.260.963			178.194.524.806

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp178.194.524.806,00 terdiri dari:

- c. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp34.751.331.978,00 (Lampiran III);
- d. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp143.443.192.828,00.

Berdasarkan KMK Nomor 2/KM.2/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran c.q Otoritas Jasa Keuangan Selaku Kuasa Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) dan KMK Nomor 69/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran selaku Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) yang dipergunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa status Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN merupakan Barang Milik Negara.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 30 September 2015, OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum ada berita acara serah terima atas aset dimaksud dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan kepada OJK.

3.10. Aset Lainnya

3.10.1. Aset Pajak Tangguhan

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp378.704.945.750,00 dan Rp238.419.480.250,00.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo Awal	238.419.480.250	28.227.043.277
Mutasi:		
Penambahan tahun berjalan	197.309.819.750	256.034.465.473
Pemulihan	(57.024.354.250)	(45.842.028.500)
Saldo Akhir	378.704.945.750	238.419.480.250

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban (penghasilan) pajak kini	342.879.801.250	237.639.924.462
Penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode lalu	-	-
Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya	(140.285.465.500)	(210.192.436.973)
Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru	-	-
Beban pajak penghasilan badan	202.594.335.750	27.447.487.489

3.10.2. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang

Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp180.715.820.995,00 dan Rp00,00. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada Tahun 2016 merupakan sisa

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dana imbalan kerja jangka panjang yang belum direncanakan untuk direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2017.

3.11. Utang Operasional dan Administratif

Saldo Utang Operasional dan Administratif per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.681.413.737,00 dan Rp64.490.754.225,00. Utang Operasional dan Administratif terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga yang timbul karena operasional OJK dan Utang Pajak Potong/Pungut yang belum diselesaikan penyetorannya per 31 Desember 2016 dan 2015.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Pajak Potong/Pungut adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang kepada Pihak Ketiga	12.342.978.353	44.664.432.107
Utang Pajak Potong/Pungut	1.338.435.384	19.826.322.118
Jumlah	13.681.413.737	64.490.754.225

Atas Utang kepada Pihak Ketiga dimaksud diselesaikan dengan menggunakan anggaran Tahun 2016 melalui pos susulan sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp9.745.118.859,00.

3.12. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp21.647.754.921,00 dan Rp14.510.361.627,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Registrasi	53	16.802.078
1	Perbankan	-	16.802.025
2	Pasar Modal	53	53
3	Industri Keuangan Non Bank	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

II	Biaya Tahunan	20.843.437.943	14.429.877.349
1	Perbankan	5.175.017.450	868.290.000
2	Pasar Modal	11.827.853.420	7.580.280.502
3	Industri Keuangan Non Bank	3.840.567.073	5.981.306.847
III	Sanksi	667.361.523	29.292.200
1	Perbankan	1.386.029	3.246.000
2	Pasar Modal	665.835.494	25.906.200
3	Industri Keuangan Non Bank	140.000	140.000
IV	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya	126.946.350	34.390.000
1	Renewable Power Indonesia	46.675.200	-
2	PT Hanson International Tbk	32.000.000	32.000.000
3	PT Bank Pembangunan Daerah NTT	18.260.780	-
4	Dana Pensiun Karyawan Bank Mandiri	8.063.451	-
5	Violando Aloysius Teguh-Bank CIMB	6.700.000	-
6	Dana Pensiun Kartika Chandra	2.500.000	-
7	Richard Budisetia	2.446.237	-
8	PT BPR Kedung Arto	2.390.000	2.390.000
9	Dana Pensiun Avesta Continental Pack	1.906.557	-
10	Charles Hermawan	1.819.651	-
11	Penerimaan dari Panitia Urusan Piutang Negara	1.690.000	-
12	Oman Pieters Arifin	1.076.929	-
13	Erika Kartikawati	500.000	-
14	Drs. Muliadi Sunidja	454.545	-
15	PT. BPR Sarana Sukses	140.000	-
16	Sinarahardja Djana	108.000	-
17	Patuan Sinaga	100.000	-
18	Tatyana Inrati hasjim SH	100.000	-
19	Taufiq H	15.000	-
V	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk	10.009.052	-
1	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk	10.009.052	-
	Jumlah	21.647.754.921	14.510.361.627

3.13. Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.805.018.736,00 dan Rp15.171.713.057,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Denda wanprestasi penyelesaian pekerjaan pengadaan Infrastruktur	1.258.255.782	-
2	Retur pihak ketiga atas pengadaan	431.807.143	-
3	Retur atas penggunaan dana	81.595.187	12.533.777.450
4	Denda Wanprestasi Pengadaan Jasa Konsultansi	33.360.624	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5	Pengembalian kelebihan gaji	-	69.652.250
6	Penyetoran jasa giro APBN	-	2.568.283.357
	Jumlah	1.805.018.736	15.171.713.057

Atas Utang Setoran ke Kas Negara dimaksud telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara pada Tahun 2017.

3.14. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

- 1) Program Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:
 - a) Program Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun
 - i. Program Pensiun
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dana Pensiun OJK.
 - ii. Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK.
 - b) Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya
 - i. Uang Pesangon
Uang pesangon diberikan pegawai sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.
 - ii. Tunjangan Pasca Jabatan
Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.
 - c) Program Imbalan Kerja Jangka Panjang
 - i. Biaya Pakaian Dinas dan Kacamata
OJK memberikan bantuan pembelian pakaian jabatan bagi pegawai dengan jabatan Kepala Subbagian ke atas atau yang setingkat dengan tarif biaya ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK, serta memberikan pakaian dinas bagi pegawai dengan jabatan tertentu antara lain pengemudi, pengamanan, protokol, ajudan, dan resepsionis. Selain itu, OJK juga memberikan bantuan pembelian kacamata kepada pejabat dan pegawai.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ii. Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus.

iii. Penghargaan Masa Pengabdian

Pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya.

2) Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

a) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp486.226.763.853,00 dan Rp154.207.445.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	Program Pensiun	TPHT	TKHT	Uang Pesangon	TPJ	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	B Pakaian dan Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2015	(33.858.514)	(13.295.695)	(40.861.003)	(7.316.496)	-	(36.044.404)	(22.831.333)	-	(154.207.445)
Beban Imbalan Kerja	(146.961.503)	(95.597.108)	(107.975.584)	(17.954.538)	(61.221.264)	(46.240.310)	(61.980.937)	(22.185.491)	(560.116.735)
Pendanaan OJK	51.540.969	32.163.834	83.825.670	-	-	-	-	-	167.530.473
Pembayaran Manfaat	-	-	-	2.003.723	-	30.641.011	15.800.922	12.121.288	60.566.944
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2016	(129.279.048)	(76.728.969)	(65.010.917)	(23.267.311)	(61.221.264)	(51.643.703)	(69.011.348)	(10.064.203)	(486.226.763)

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.028.593.020.000,00 dan Rp911.731.599.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	Program Pensiun	TPHT	TKHT	Uang Pesangon	TPJ	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	B Pakaian dan Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2015	(22.028.723)	(47.251.152)	-	(58.944.685)	(35.519.761)	(73.144.306)	(658.637.940)	(16.205.032)	(911.731.599)
Beban Imbalan Kerja	99.382.953	49.547.365	43.078.259	(21.201.729)	42.879.003	(117.888.929)	(173.602.985)	(3.681.428)	(81.487.491)
Beban Imbalan Kerja OCI	19.002.760	(6.318.958)	(42.578.729)	(5.401.554)	(77.449)	-	-	-	(35.373.930)
Pendanaan OJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Manfaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2016	96.356.990	(1.022.743)	499.530	(85.547.968)	7.281.793	(191.833.735)	(832.240.925)	(19.886.460)	(1.028.593.020)

3) Asumsi-Asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2016 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Laporan Aktuaris Nomor 0070/ST-RS-PSAK24-OJK/II/2017 tanggal 25 Januari 2017.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

Keterangan	2016	2015
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto :		
- Program Pensiun	9,47% per tahun	9,13% per tahun
- Tuperum	8,50% per tahun	8,32% per tahun
- Kesehatan	8,90% per tahun	9,94% per tahun
- Pesangon	8,10% per tahun	8,88% per tahun
- Pasca Jabatan	6,00% per tahun	8,88% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	8,10% per tahun	7,70% per tahun
- Cuti Besar (DK)	6,00% per tahun	7,70% per tahun
- PMP (Pegawai)	8,10% per tahun	7,70% per tahun
- PMP (DK)	6,00% per tahun	7,70% per tahun
- Pakaian Pejabat	8,10% per tahun	8,88% per tahun
- Kacamata	8,10% per tahun	8,88% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP dan Gaji pokok	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan (<i>trend</i> biaya)	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal

Keterangan	2016	2015
Asumsi Lainnya		
	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp 10,000,000/orang/tahun di usia 56	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp 9,500,000/orang/tahun di usia 56
	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal.	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal.
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita).	56, 58 dan 60 tahun (pria dan
Loading Pajak		
Asumsi Pajak:		
- Program Pensiun	Pajak Individual dengan maksimum 26.3%	mengikuti Pajak Individual
- Perumahan	25%	25%
- Kesehatan	-	-
- Pesangon	15%	15%
- Pasca Jabatan	25%	15%
- Cuti Besar (Pegawai)	25%	25%
- Cuti Besar (DK)	25%	25%
- PMP (Pegawai)	25%	25%
- PMP (DK)	25%	25%
- Pakaian Pejabat	15%	25%
- Kacamata	15%	25%

Aset program OJK pada Dana Pensiun dan YKP sebesar Rp378.778.341.000,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Program OJK per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut

(dalam rupiah)

Keterangan	Aset Program
DAPEN OJK	
a. Dana Pensiun	151.243.689.000
Yayasan Kesehatan Pegawai OJK (YKP OJK)	227.534.652.000
a Perumahan	45.910.396.000
b. Kesehatan	181.624.256.000
Jumlah	378.778.341.000

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dana Pensiun (DAPEN) per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut.

No	Penempatan pada DAPEN	Per 31 Desember 2016 (%)
1	Deposito <i>on call</i> pada Bank	1,66
2	Deposito berjangka pada Bank	28,23
3	Surat Berharga Negara	10,18
4	Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	4,8
5	Obligasi korporasi yg tercatat di Bursa Efek di Indonesia	30,43
6	Reksa Dana	
	a. Reksa Dana Pendapatan Tetap	5,18
	b. Reksa Dana Campuran	1,99
	c. Reksa Dana Saham	14,41
7	Efek Beragun Aset	3,12
	Jumlah	100,00

Dana investasi YKP sebesar Rp237.922.586.197,00 yang merupakan kumpulan dana aset program dari OJK/BI dan dana operasional YKP ditempatkan pada beberapa instrumen keuangan dengan komposisi sebagai berikut.

No	Penempatan pada YKP	Per 31 Desember 2016 (%)
1	Deposito	95,95
2	Surat Utang	1,26
3	Reksadana	2,79
	Jumlah	100,00

Sebagai informasi bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Bank Indonesia telah melakukan pembayaran kepada YKP-OJK untuk TPHT sebesar Rp10.669.118.697,00 dan TKHT sebesar Rp83.825.670.549,00 dengan jumlah Rp94.494.789.246,00.

Selain itu, terdapat pula beban imbalan kerja atas iuran pasti sebesar Rp13.446.376.944,00 yang terdiri dari iuran pegawai sebesar Rp4.714.083.704,00 dan iuran OJK sebesar Rp8.732.293.240,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.15. Utang Pajak Badan

Saldo Utang Pajak Badan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp892.470.720.403,00 dan Rp237.639.924.462,00 yang merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Rincian Utang PPh Badan Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang PPh Badan 2015	237.639.924.462	-
Koreksi Utang PPh Badan 2015 (sesuai SKPKB)	254.471.553.038	-
Sanksi Administrasi (sesuai SKPKB)	118.106.754.600	-
Utang PPh Badan tahun berjalan	342.879.801.250	237.639.924.462
Angsuran PPh Badan	(60.627.312.947)	-
Jumlah	892.470.720.403	237.639.924.462

Perhitungan utang PPh Badan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	2016	2015
a. Penghasilan kena pajak tahun berjalan	1.371.519.205.762	950.559.697.849
b. Pajak Badan Terutang (25%*a)	342.879.801.250	237.639.924.250
c. Pembayaran tahun berjalan	-	-
d. Utang pajak badan	342.879.801.250	237.639.924.250

Sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, utang PPh Badan Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp610.218.212.100,00 yang terdiri dari PPh terutang sebesar Rp492.111.477.500,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00. Atas SKPKB tersebut, utang PPh Badan Tahun 2015 yang semula diakui sebesar Rp237.639.924.462,00 telah dilakukan koreksi pada tahun berjalan sebesar Rp372.578.287.638,00. Sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00 saat ini dalam proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02/MS.4/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi.

OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

No.	Nomor NTPN	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1	75B5E16URU5TLUN8	30 Desember 2016	60.627.312.947
2	138775BMGNATA228	16 Januari 2017	5.125.211.854
3	299997NTRQ9QBPMO	1 Maret 2017	172.047.275
Jumlah			65.924.572.076

Dari jumlah pembayaran angsuran PPh sebesar Rp65.924.572.076,00 tersebut, terdapat pembayaran yang berasal dari kelebihan target penerimaan pungutan Tahun 2015 yang digunakan Tahun 2016 sebesar Rp4.627.312.947,00.

3.16. Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.197.112.973.414,00 dan Rp3.902.078.772.091,00.

Mutasi Aset Neto pada Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2015	3.902.078.772.091	1.826.082.487.224
<u>Mutasi:</u>		
Perubahan Aset Neto	250.038.389.764	2.020.623.777.370
Penyesuaian Aset Neto	44.995.811.559	55.372.507.497
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2016	4.197.112.973.414	3.902.078.772.091

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	Perubahan Aset Neto		
1	Reklas saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka ke Kas yang dibatasi penggunaannya		10.568.268.678
2	Koreksi Piutang Lain-lain	(5.003.268.780)	(24.598.105)
3	Koreksi Piutang Pungutan Tahun lalu		(442.520.135)
4	Pengembalian TAYL		(12.158.850)
5	Mutasi Piutang Lain		(100.838.105)
6	Mutasi Utang Operasional		(46.790.607)
7	Koreksi Pajak Badan		61.938.480.094
8	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara		117.899.003
9	Koreksi Saldo Awal Penyusutan		(1.453.521.330)
10	Reklas Utang Setoran Ke Kas Negara	1.805.018.736	(15.171.713.057)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	Perubahan Aset Neto		
11	Koreksi pembukuan pajak satker	6.102.180	
12	Pendapatan Other Comprehensive Income (OCI) atas Liabilitas Imbalan kerja	(35.373.930.000)	-
13	Koreksi nilai tanah	58.000.000	-
14	Pembayaran TKHT pegawai	83.825.670.000	-
15	Koreksi utang pajak 2015	54.145.220	-
16	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	38.289.350	-
17	Koreksi piutang pungutan lain-lain tahun 2015	(414.215.147)	
Jumlah Penyesuaian Aset Neto		44.995.811.559	55.372.507.586

3.17. Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.416.320.218.849,00 dan Rp5.655.273.293.711,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan Pungutan	4.416.320.218.849	3.924.646.956.260
Pendapatan APBN	-	1.730.626.337.451
Jumlah	4.416.320.218.849	5.655.273.293.711

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2016	31 Desember 2015
I	Registrasi	54.517.304.864	35.952.398.233
1	Perbankan	593.893.591	1.850.025.000
2	Pasar Modal	48.043.411.273	33.022.326.567
3	Industri Keuangan Non Bank	5.880.000.000	1.080.046.666
II	Biaya Tahunan	4.140.038.895.326	3.812.624.977.549
1	Perbankan	3.069.693.507.713	2.752.773.369.144
2	Pasar Modal	455.032.137.257	480.968.704.519
3	Industri Keuangan Non Bank	615.313.250.356	578.882.903.886
III	Sanksi	22.903.399.767	26.002.626.145
1	Perbankan	9.160.541.900	12.088.930.554
2	Pasar Modal	11.254.047.323	11.780.437.000
3	Industri Keuangan Non Bank	2.488.810.544	2.133.258.591
IV	Pengelolaan	198.860.618.892	50.066.954.333
1	Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	147.322.246.808	23.224.329.772
2	Jasa Giro Rekening Pungutan	42.115.515.702	26.485.748.427
3	Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	8.694.820.994	-
4	Denda Wanprestasi	465.111.340	139.495.128

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sektor	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5	Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	262.921.648	217.351.005
6	Setoran Uji Coba Sistem Host to Host	2.400	30.001
	Jumlah	4.416.320.218.849	3.924.646.956.260

3.18. Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.166.281.829.085,00 dan Rp3.634.649.516.341,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Kegiatan Operasional	487.634.978.517	530.706.001.785
Beban Kegiatan Administratif	3.501.911.870.740	2.948.045.303.050
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	148.318.518.969	111.616.271.492
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	28.416.460.859	44.281.940.014
Jumlah	4.166.281.829.085	3.634.649.516.341

1) Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp487.634.978.517,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2016
Fungsi Pengaturan	194.268.576.559
Fungsi Pengawasan	233.106.956.199
Fungsi Penegakan Hukum	21.217.564.893
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	39.041.880.866
Jumlah Beban Kegiatan Operasional	487.634.978.517

2) Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp3.501.911.870.740,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2016
Beban Perkantoran	261.157.171.097
Beban Remunerasi	1.901.821.422.584
Beban Pendidikan dan Pelatihan	17.802.768.956
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	156.181.529.110
Beban Imbalan Pasca Masa Kerja	589.776.335.605
Beban Pajak Badan	575.172.643.388
Jumlah Beban Kegiatan Administrasi	3.501.911.870.740

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp148.318.518.969,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi. dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2016
Beban Penyusutan	97.066.920.284
Beban Amortisasi	35.023.302.764
Beban Persediaan	16.228.295.921
Jumlah Beban Kegiatan Pengadaan Aset	148.318.518.969

4) Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp28.416.460.859,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan Kekaryawanan dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2016
Beban Representasi	21.855.294.349
Beban Kekaryawanan	6.540.344.510
Beban Lainnya	20.822.000
Jumlah Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	28.416.460.859

3.19. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2016

1. Kas masuk dari pendapatan pungutan OJK Tahun 2016 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penerimaan piutang tahun sebelumnya	10.581.747.272
Penerimaan Tahun 2016	4.379.360.570.242
Penerimaan dari pendapatan diterima dimuka	7.127.384.242
Jumlah	4.397.069.701.756

2. Kas masuk dari pendapatan APBN

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Denda Wanprestasi Tahun 2014	1.258.255.782
Retur Tahun 2014	431.807.143
Denda Wanprestasi Tahun 2015	33.360.624
Retur Tahun 2015 dan Retur Tahun 2016	81.595.187
Jumlah	1.805.018.736

Kas masuk dari pendapatan APBN merupakan pengembalian belanja atas beban APBN.

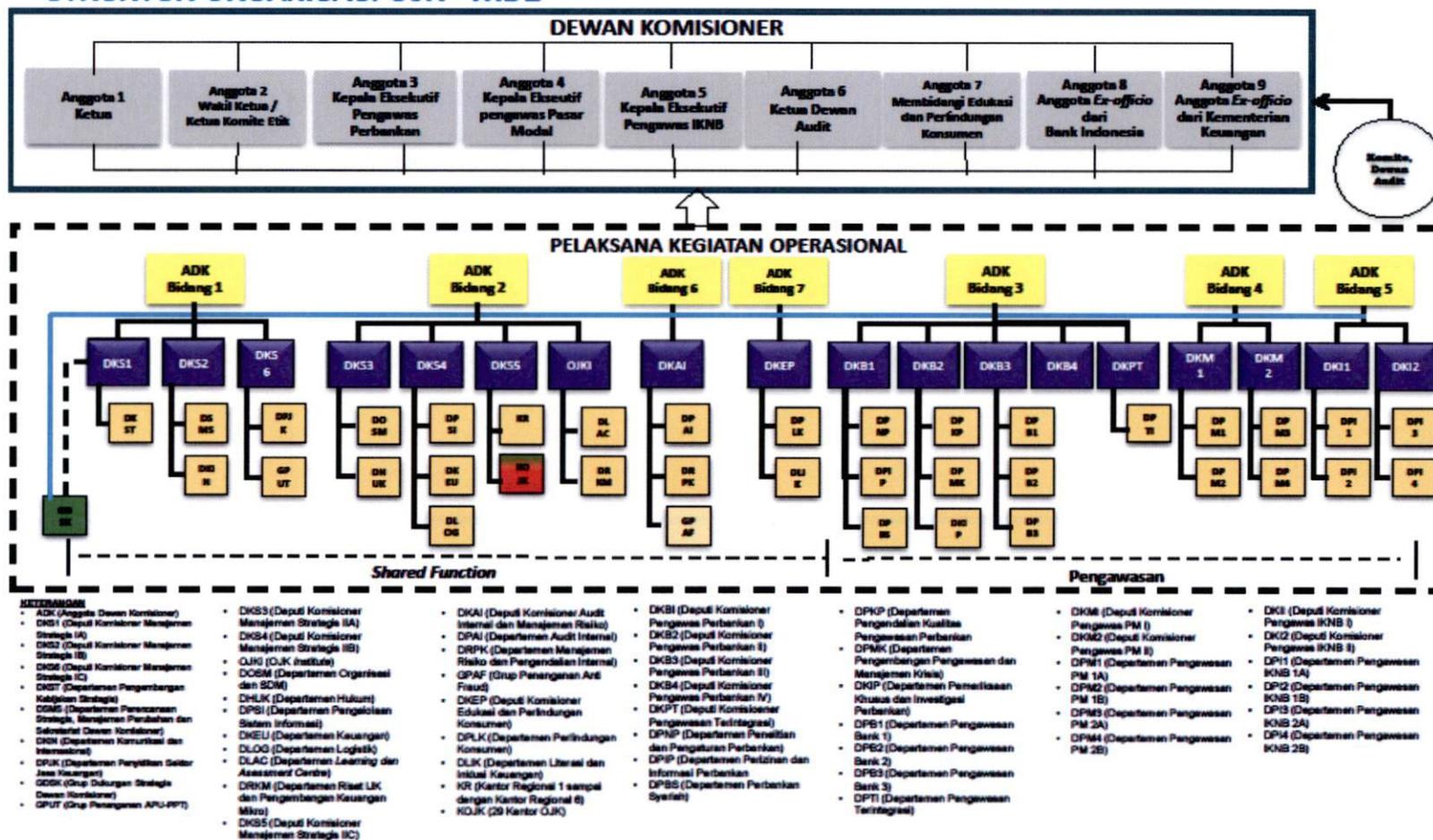
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk pembayaran Pos Susulan Tahun 2016, pembayaran Utang Tahun 2015, perolehan Aset Tetap dan Aset TakBerwujud dan pengeluaran Beban Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah
Pembayaran Pos Susulan Tahun 2016	9.431.391.585
Pembayaran Utang Tahun 2015	64.490.126.348
Perolehan Aset Tetap dan Aset TakBerwujud	379.538.929.163
Beban Tahun 2016	3.538.338.873.728
Jumlah	3.991.799.320.824

STRUKTUR ORGANISASI OJK - WIDE



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN II**LAPORAN KOMITMEN
PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN
PER 31 DESEMBER 2016**

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Jumlah
I	Biaya Tahunan	725.578.745
1	Perbankan	92.189.889
2	Pasar Modal	633.388.856
3	Industri Keuangan Non Bank	-
II	Sanksi	2.748.580.910
1	Perbankan	-
2	Pasar Modal	2.748.580.910
3	Industri Keuangan Non Bank	-
Jumlah		3.474.159.655

Piutang Pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp3.474.159.655,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Rapat Dewan Komisiner pada tanggal 02 Maret 2017.

LAMPIRAN III

DAFTAR ASET BARANG MILIK NEGARA

I. Aset Tetap

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2016
Peralatan dan Mesin:			
Kendaraan Bermotor Roda Dua	503.208.000	251.604.000	251.604.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	113.236.352.869	18.864.732.580	94.371.620.289
Mesin Kantor	118.733.783	41.474.493	77.259.290
Mesin Pembangkit Tenaga	1.206.859.498	429.566.673	777.292.825
Mesin Pendingin	2.119.379.274	320.430.129	1.798.949.144
Mesin Pengolah Data	60.562.565.442	24.733.854.226	35.828.711.217
Peralatan Telekomunikasi	14.638.450.241	5.356.125.728	9.282.324.512
Peralatan Lainnya	20.891.700	7.068.450	13.823.250
Peralatan Rumah Tangga	26.664.127.161	8.160.348.226	18.503.778.935
Peralatan Studio	12.898.861.920	5.334.846.683	7.564.015.238
Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.729.946.429	4.039.351.311	6.690.595.118
Jumlah	242.699.376.317	67.539.402.499	175.159.973.817

II. Aset Takberwujud

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2016
Aset Takberwujud			
Aset Takberwujud	56.165.996.655.02	21.414.664.677	34.751.331.978

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
Tahun Perolehan 2014				
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	6.037.424,17
2	Digital Camera	Sony DSC-WX350	1 unit	1.385.020,83
3	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
4	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
5	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	8.961.562,50
Tahun Perolehan 2015				
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
Jumlah				63.918.090,84

LAMPIRAN V

Daftar Tagihan Kepada Wajib Bayar yang Belum Registrasi dan Belum Diserahkan ke PUPN

(dalam rupiah)

No.	BIDANG	Wajib Bayar	Potensi Tagihan	
			2016	2015
I	PERBANKAN			
a.	Bank Perkreditan Rakyat	1	NA	NA
b.	Lembaga Penunjang Perbankan	53	NA	NA
c.	Profesi Penunjang Perbankan	22	126.324.000	159.324.000
II	PASAR MODAL			
a.	Emiten	5	NA	NA
b.	Perusahaan Efek	5	NA	NA
c.	Manajer Investasi	2	NA	NA
	Profesi Penunjang Pasar Modal			
d.	Akuntan Publik	17	97.614.000	123.114.000
e.	Konsultan Hukum	387	2.212.103.996	2.802.654.000
f.	Notaris	1.189	6.777.245.149	8.610.738.000
g.	Penilai	3	17.226.000	21.726.000
III	IKNB			
	Jasa Penunjang IKNB			
a.	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	NA	NA
b.	Perusahaan Pialang Asuransi	1	NA	NA
	Dana Pensiun			
c.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	NA	NA
	Perasuransian			
d.	Asuransi Jiwa	1	NA	NA
Jumlah		1.690	9.230.513.145	11.717.556.000

NA (Not Applicable) : Potensi Piutang tidak dapat dihitung/diestimasi karena dasar pengenaan Aset/Pendapatan Usaha tidak diketahui

Nilai tagihan yang dapat diestimasi dan belum registrasi berasal dari profesi penunjang, Perbankan dan Pasar Modal. Nilai tagihan kepada selain profesi penunjang, perbankan, dan pasar modal tidak dapat diestimasi karena dasar pengenaan berupa aset, pendapatan usaha, atau nilai kontrak tidak diketahui.

LAMPIRAN VI**Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi***(dalam rupiah)*

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Persediaan Tahun 2016
1	Stempel a.n. Ketua (Warna)	10	825.000
2	Stempel Pribadi	26	2.145.000
3	Buku Agenda Kerja	2520	243.936.000
4	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500
5	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400
6	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	8	269.280
7	Pita Mesin Tik Fullmark F 7155 BKSC	59	2.336.400
8	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180
9	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990
10	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500
11	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730
12	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500
13	Kop Surat OJK Garuda BW F4	26	1.573.000
14	Cover DIPA	100	1.430.000
15	Pin DK Kuningan	23	1.265.000
16	Huruf Timbul Kuningan	6	1.980.000
17	Kop Surat External OJK Gdg. Bidakara	18	2.178.000
18	Memo DK OJK	60	2.640.000
19	Map Logo OJK Merah Bidakara	1.000	8.800.000
20	Map LHP Dana Pensiun	400	3.960.000
21	Map Peraturan Dana Pensiun	650	6.435.000
22	Roll Up Banner 60x160	68	31.416.000
23	Buku Telepon	700	96.250.000
24	Stiker Dilarang Merokok 20 x 25 cm	240	7.920.000
25	Stker Dilarang Merokok 7 x 26 cm	80	1.320.000
26	Kumpulan UU dan PP	50	4.675.000
27	Buku Statistik LP 2012 dan Direktori LP 2013	110	15.972.000
28	Buku Perasuransisn 2012	66	13.794.000
29	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000
30	Buku Statistik DP 2012 dan Direktorat DP 2013	30	4.620.000
31	Buku Statistik LKJL 2012 dan Direktori LKJK+L 2013	107	18.564.500
32	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000
33	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000
34	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200

LAMPIRAN VI

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Persediaan Tahun 2016
35	Blanko SSP	4	2.200.000
36	Pita Epson S015505/S015384 (DFX 9000)	19	5.407.875
37	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500
38	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Colour	5	1.837.000
39	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400
40	Toner Fax Panasonic UF 4100	3	2.970.000
41	Toner HP LJ 2613 A	21	21.101.850
42	Toner HP LJ 5949 A	10	10.417.000
43	Toner HP LJ CB 380 A	11	25.773.000
44	Toner HP LJ CB 381 A	12	38.676.000
45	Toner HP LJ CB 382 A	12	43.956.000
46	Toner HP LJ CB 383 A	11	35.453.000
47	Toner HP LJ CB 387 A	13	28.671.500
48	Toner HP LJ CB 384 A	15	20.295.000
49	Toner HP LJ CB 385 A	14	30.877.000
50	Toner HP LJ CB 386 A	13	28.671.500
51	Toner Fuji Xerox Phaser 30K	5	15.785.000
52	Toner Fuji Xerox Phaser 40K	5	20.573.440
53	Toner Xerox CT 200655 Black	4	5.632.000
54	Toner Xerox CT 200656 Cyan	5	19.387.500
55	Toner Xerox CT 200657 Magenta	5	19.387.500
56	Toner Xerox CT 200658 Yellow	5	19.387.500
57	Toner Fuji Xerox 200226 Black	30	27.390.000
58	CD Statistik LKJL 2012 dan Direktori LKJL 2013	176	6.776.000
59	Drum Facsimile Toshiba DP 80F	2	3.439.700
60	Drum Panasonic KX FA 412 F	3	2.970.000
Jumlah			962.389.445